

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen tahun 2017 telah selesai disusun.

Buku ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntailitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2017 sesuai dengan penetapan kinerja. Penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen tahun 2017, disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah memuat langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di kabupaten Kebumen.

Kebumen, Januari 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Ikhtisar Eksekutif		iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Data Umum Organisasi	1
	B. Aspek Strategis Organisasi	3
	C. Isu Strategis	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Perencanaan Strategis	6
	B. Rencana Kinerja tahun 2017	7
	B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	11
	B. Realisasi Anggaran	12
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	16
	B. Strategi peningkatan kinerja yang akan datang	16
LAMPIRAN		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021, dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Kebumen melaksanakan 2 misi Bupati yaitu :

1. Misi ke 2 : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan, melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
2. Misi ke 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government), dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang cepat bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif, guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Sasaran yang dituju melalui pelaksanaan program dan kegiatan di tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.
2. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum.

Untuk mencapai sasaran pada tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.010.281.000,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.523.712.000,00
- b. Belanja langsung sebesar Rp. 8.486.569.000,00 dituangkan ke dalam 11 program dan 34 kegiatan.

Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung tercapai sebesar Rp. 2.357.384.053,00 (93%)
2. Belanja Langsung tercapai Rp. 7.358.788.160,00 (87%)

Semua program dan kegiatan BPBD kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sudah terlaksana dengan cukup baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang presentase penyerapan anggarannya rendah. Adapun untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu kegiatan Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana tercapai dengan baik, capaian keuangan mencapai 94%, sedangkan realisasi fisik dari rencana pembentukan 4 desa tangguh bencana tercapai 100%.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, sedangkan anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

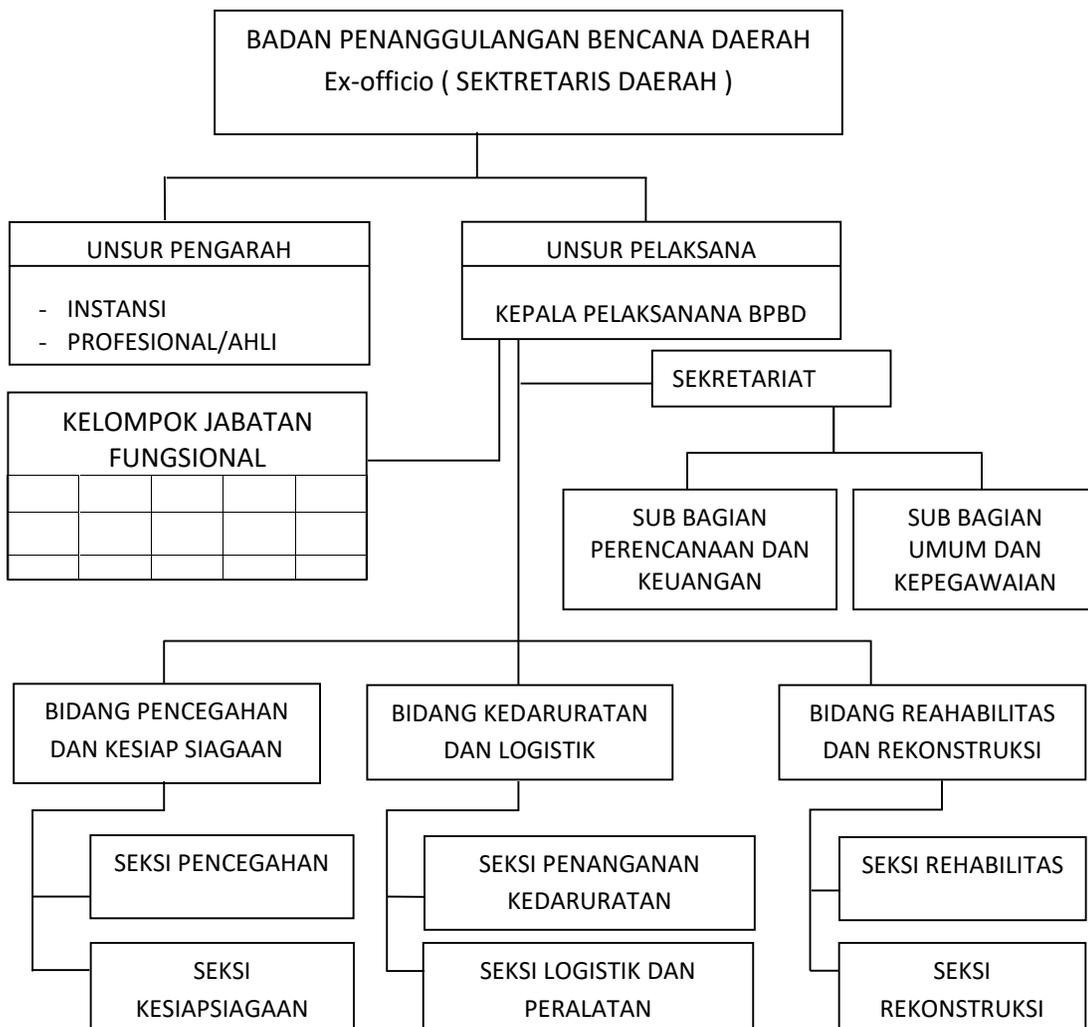
1. Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Kebumen

2. Sekretariat

- a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Seksi Pencegahan
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan
 - b. Kepala Seksi Logistik dan peralatan
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - b. Kepala Seksi Rekonstruksi

BAGAN ORGANISASI BPBD



B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan terhadap masyarakat di wilayah kabupaten Kebumen dari ancaman bencana, maka perlu dilaksanakan berbagai upaya/usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat, penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh masyarakat melalui kerjabakti maupun penanganan darurat bencana berupa perbaikan darurat infrastruktur, sarana dan prasarana umum di masyarakat, pemberian bantuan logistik kebencanaan bagi masyarakat korban bencana yang membutuhkan serta bantuan penanganan pasca bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan pasal 19 undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di jelaskan bahwa BPBD memiliki 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi koordinasi, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
2. Fungsi komando, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Fungsi pelaksana, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tiga fungsi diatas maka penanggulangan bencana membutuhkan pengintegrasian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh semua SKPD, terutama dalam rangka pengurangan risiko bencana.

C. Isu Strategis

Secara nasional, kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sasarannya adalah “Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”. Komitmen sebagai tindak lanjut PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pembangunan nasional telah diwujudkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan memuat esensi investasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Penerapan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen tentu saja tidak terlepas dari perkembangan lingkungan eksternal baik lokal/regional, nasional maupun internasional. Isu-isu strategis eksternal terkait penanggulangan bencana sebagaimana table berikut:

Tabel 1. Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
	Kesepakatan di tingkat global yang mengukung konsep pengurangan risiko bencana seperti Hygo Framerwork for Action 2005 - 2015 yang dilanjutkan menjadi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.	1. Semangat nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan. 2. Bencana dan Kebakaran telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan dimaksud sesuai dengan pasal 12 ayat (1) UU 23/2014	Diundangkannya perda : 1. Perda No.4 th 2014 tentang Penanggulangan Bencana di kab. Kebumen. 2. Perda No.1 Th 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kab. Kebumen	1. Perda RT/RW dan Dokumen KLHS belum dilaksanakan dengan baik, terkait Pembangunan pada Daerah Rawan Bencana. 2. Dunia Usaha memiliki kewajiban untuk turut berperan dalam penanggulangan bencana melalui CSR

Perwujudan yang mendasar dalam penerapan kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen adalah membangun kemitraan dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujudkan ketangguhan di tingkat masyarakat dengan memperhatikan dimensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Semangat ditataran global telah dicerminkan dalam Konfensi Dunia PRB ke-3 di Sendai yang dinaungi oleh Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana. Indonesia telah menyampaikan tantangan terkait dengan tata kelola dalam kebencanaan dengan semakin meningkatkan berbagai permasalahan pembangunan di era saat ini.

Tantangan berupa upaya pengurangan kemiskinan, kerusakan lingkungan, urbanisasi, air bersih, serta isu perubahan iklim dengan kejadian kebencanaan yang semakin meningkat. Indonesia telah berupaya dengan meletakkan peraturan perundangan terkait dengan bencana, kelembagaan kebencanaan dari tingkat nasional hingga daerah, perencanaan kebencanaan, menjalin kemitraan dengan berbagai multi pihak di bidang bencana, dan membangun ketangguhan dari kepemimpinan dan keterlibatan secara inklusif untuk tata kelola kebencanaan di Indonesia. Tantangan yang cukup besar adalah sebagai “Negara Kepulauan” yang berwawasan Nusantara, pemanfaatan modal budaya dan sosial menjadi penting dalam tata kelola kebencanaan. Hal ini masuk dalam dokumen SFDRR 2015-2030 yang ditetapkan sebagai Negara kepulauan menjadi karakteristik yang spesifik, karena memiliki risiko dan tantangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara daratan.

Terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, dengan melibatkan unit Perangkat Daerah lainnya, masyarakat dan dunia usaha.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen untuk periode 2016-2021, yaitu dengan Visi : **“BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”**. Terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen, maka visi ini mengandung arti bahwa di masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Kebumen akan semakin sejahtera, berdaya (tangguh dalam menghadapi permasalahan bencana).

Dalam rangka mendukung pencapaian visi bupati terpilih, BPBD Kabupaten Kebumen menitikberatkan pada pelaksanaan misi bupati sebagai berikut :

- a. Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
- b. Misi ke-6 Bupati yaitu : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayan publik, sistim kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel yang di dukung dengan sistim pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2. Tujuan dan sasaran strategis jangka menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi bupati Kebumen Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran yang harus diupayakan untuk di capai oleh Perangkat Daerah terkait, adalah hal ini Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016.

Tujuan, Sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1

Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum								
Indikator Tujuan	Meningkatnya Indeks Ketenteraman Sosial								
Sasaran	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum								
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi 2015	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Desa Tangguh Bencana Terbentuk	%	15 (7%) Dari 210 desa rawan	6 (%)	6 (10,9%)	6 (13,8%)	7 (17,1%)	8 (20,9%)	9 (44%)	53

B. Rencana Kinerja tahun 2017

Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum serta mencapai indikator kinerja utama, yaitu dengan melaksanakan upaya peningkatan kapasitas kepada masyarakat melalui sosialisasi baik langsung kepada masyarakat maupun dengan media sosialisasi yang lain seperti rambu-rambu peringatan kebencanaan serta dengan menjaga selalu fungsi dari peralatan peringatan dini bencana (Early Warning System) serta pelatihan baik terhadap masyarakat maupun relawan yang ada.

Upaya yang lebih khusus dalam rangka pencapaian Indikator kinerja Utama adalah dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana yang tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk selalu peduli terhadap lingkungannya akan ancaman bencana yang ada disekitar mereka serta untuk meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana pada desa masing masing. Adapun untuk tahun 2017 dilaksanakan di 4 desa pada 3 kecamatan yaitu desa Karangrejo dan desa

Tegalretno kecamatan Petanahan, desa Jogosimo Kecamatan Klirong serta, desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal.

Adapun rencana capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sampai dengan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. Kebumen tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	11% (27 dari 210 desa)

C. Perjanjian kinerja

Upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran, target dan indikator kinerja diatas dituangkan ke dalam pelaksanaan 11 program dan 34 kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.3. Program/Kegiatan tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		932.141.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4.900.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.000.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	50.000.000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	313.879.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	60.000.000
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	27.000.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	41.935.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	36.000.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.000.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	4.400.000

	perundang-undangan		
11	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	40.000.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	220.000.000
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	80.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.617.113.000
14	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	6 unit	1.270.000.000
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	31 unit	40.000.000
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	15 unit	82.113.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7 paket	225.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000
18	Pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	25.000.000
IV	Program pengembangan data/informasi		70.000.000
19	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	2 dokumen	20.000.000
20	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan kawasan rawan bencana	1 dokumen	50.000.000
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		2.473.567.000
21	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	3 Keg	2.230.535.000
22	Pengadaan logistik bantuan kebencanaan	1 paket	243.032.000
VI	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		100.000.000
23	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	100.000.000
VII	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		1.241.057.000
24	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	3 Kegiatan	180.855.000
25	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	100 orang	282.402.000
26	Droping Air Bersih	1600 tanki	315.000.000

27	Pelatihan penanggulangan bencana	1 Kegiatan	115.000.000
28	Penyusunan peta resiko rawan bencana	2 kec	100.000.000
29	Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	4 desa	150.000.000
30	Fasilitasi forum pengurangan risiko bencana (PRB) dan relawan	2 kegiatan	97.800.000
VIII	Program tanggap darurat jalan dan jembatan		985.000.000
31	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	1 paket	985.000.000
IX	Program pengendalian banjir		832.000.000
32	Pembangunan infrastruktur pengairan pasca bencana alam	1 paket	832.000.000
X	Program Perbaikan Rumah akibat bencana alam/sosial		200.718.000
33	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	1 paket	200.718.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		8.486.569.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Upaya yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kebumen di tahun 2017 dalam rangka mencapai sasaran strategis perangkat daerah, target yang ditetapkan serta indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah dengan melaksanakan program/kegiatan yang muaranya adalah meningkatnya kemandirian/ketangguhan desa dalam menanggulangi bencana, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Adapun Indikator Kinerja Utama BPBD kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 3.1. Capaian Kinerja tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	4 desa Rencana s/d 2017 tercapai 10,95 % dari 210 desa (22 desa)	4 desa s/d 2017 tercapai 13,8 % dari 210 desa (29 desa)

Berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja utama diatas, dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembentukan desa tangguh bencana pada tahun 2017 tercapai 100 %, yaitu dari target 4 desa terlaksana semua. Sedangkan untuk capaian keseluruhan, dari rencana target sebesar 10,95% dari 210 desa rawan bencana bisa tercapai 13,8%, ini disebabkan karena kegiatan pembentukan desa tangguh bencana terbantu oleh kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD provinsi Jawa Tengah dan BNPB. .

Capaian Indikator kinerja Utama BPBD Kabupaten Kebumen apabila kita sandingkan dengan capaian tahun-tahun yang lalu, dalam Renstra tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2

Evaluasi kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target s/d 2021	Realisasi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	25,24 %	11,9%	13,8%				

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2017, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kebumen secara umum sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, baik kegiatan yang secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama maupun yang tidak secara langsung mendukung capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Kegiatan yang langsung mendukung capaian indikator kinerja utama yaitu pembentukan desa tangguh bencana, yang pada tahun 2017 dilaksanakan pada 4 desa di 3 kecamatan yaitu desa Karangrejo dan desa Tegalretno kecamatan Petanahan, desa Jogosimo Kecamatan Klirong serta, desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal, telah tercapai 100 %.
2. Sedangkan untuk program/kegiatan yang tidak secara langsung mendukung indikator kinerja utama, rata-rata capaian fisik kegiatan mencapai 87 %.

B. Realisasi Anggaran

BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 melaksanakan 11 program yang terbagi kedalam 34 kegiatan, dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.486.569.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.358.788.160,00 (87 %) dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		954.614.000	762.025.659	82 %
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4.900.000	4.202.480	86 %
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.000.000	35.220.842	70 %
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	50.000.000	39.025.000	78 %
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	313.879.000	237.726.287	76 %
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10 orang	60.000.000	54.278.000	90 %
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	41.935.000	36.987.200	90 %
7	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	49.500.000	44.018.900	88 %
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	36.000.000	35.419.000	98 %
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.000.000	3.809.000	95 %
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.400.000	3.526.000	80 %
11	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	40.000.000	37.715.150	94 %
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	220.000.000	205.983.700	94 %
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	80.000.000	43.846.500	55 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.617.113.000	1.610.817.466	99,6 %
14	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	3 unit	1.270.000.000	1.268.900.000	99 %
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 unit	40.000.000	38.500.000	96 %
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	15 unit	82.113.000	79.990.000	97 %

17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 paket	225.000.000	223.427.466	99 %
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000	6.908.417	28%
18	Pendidikan dan pelatihan formal	2 orang	25.000.000	6.908.417	28 %
IV	Program pengembangan data/informasi		70.000.000	55.103.900	79 %
19	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	2 dokumen	20.000.000	19.357.000	97 %
20	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	1 dokumen	50.000 000	35.746.900	71 %
V	Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah		10.000.000	9.834.100	98 %
21	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik.	1 dokumen	10.000.000	9.834.100	98%
VI	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		100.000.000	72.995.800	73 %
22	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	100.000.000	72.995.800	73 %
VII	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial		2.473.567.000	2.425.248.572	98%
23	Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	2 kegiatan	2.230.535.000	2.185.150.472	98 %
24	Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	625 paket	243.032.000	240.098.100	99 %
VIII	Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam dan sosial		200.718.000	186.702.937	93 %
25	Fasilitasi dan stimulasi	1 paket	200.718.000	186.702.937	93 %

	rehabilitasi rumah akibat bencana alam				
IX	Program Tanggap Darurat jalan dan Jembatan		985.000.000	700.116.320	71 %
26	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	1 paket	985.000.000	700.116.320	71 %
X	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam		1.241.057.000	935.597.479	75 %
27	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	3 keg	180.855.00	156.713.250	87 %
28	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan Bencana Alam	100 orang	282.402.000	208.670.950	74 %
29	Droping Air Bersih	1600 tanki	315.000.000	193.667.208	61 %
30	Pelatihan penanggulangan bencana	1 Kegiatan	115.000.000	108.620.921	94 %
31	Penyusunan peta resiko rawan bencana	2 kec	100.000.000	67.521.800	68 %
32	Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	4 desa	150.000.000	141.443.350	94 %
33	Fasilitasi Forum PRB dan relawan	2 keg	97.800.000	58.960.000	60 %
XI	Program Pengendalian Banjir		832.000.000	592.437.510	71 %
34	Pembangunan Infrastruktur Pengairan Pasca Bencana Alam	1 Paket	832.000.000	592.437.510	71 %
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		8.486.569.000	7.358.788.160	87 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2017 secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang kurang maksimal pada pelaksanaannya yang disebabkan kurang cermatnya penyusunan perencanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga terjadi kendala pada pelaksanaan kegiatannya.
2. Dalam kegiatan pembentukan Tangguh Bencana juga masih diperlukan pembinaan secara berkesinambungan, sebab untuk menjadikan sebuah desa masuk dalam katagori desa tangguh bencana terdapat 20 indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi desa tangguh bencana.
3. Pelaksanaan tanggap darurat bencana di kabupaten kebumen sudah terlaksana dengan baik karena dukungan Anggaran APBD kabupaten Kebumen, disamping peran serta dari masyarakat dan dunia usaha yang sudah cukup baik.
4. Upaya penanganan bencana pada tahap pasca bencana juga sudah semakin baik, yang di sebabkan sudah adanya koordinasi yang baik dengan perangkat Daerah terkait, dengan didukung alokasi anggaran yang cukup.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA YANG AKAN DATANG.

Dengan melihat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, khususnya yang terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui serta agar lebih meningkat kinerjanya di tahun yang akan datang perlu ditempuh beberapa hal berikut ini :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai Renstra dengan lebih mencermati sasaran dan pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi semakin efektif.
2. Sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan baik oleh pemerintah Kabupaten Provinsi maupun Pusat.

3. Mengelola sarana prasarana dan SDM yang dimiliki dengan maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas dan RKO masing masing kegiatan.
5. Meningkatkan keterlibatan stakeholder terkait dan satuan kerja lainnya guna mengembangkan pengelolaan Kebencanaan.
6. Mendorong desa untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana melalui APBDesa untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD Kabupaten.